

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
-*Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Gandasubrata H.R. Purwanto, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998.
- Handoko Priyo, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank*, Center For Society, Jember, 2006.
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2010.
- HSSalim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Khoidin M., *Problematika Seputar Sertifikat Hak Tanggungan*, LaksBang, Yogyakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
-*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Hadjon Philipus, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif dan Filsafat*, Fakultas Hukum Unair Surabaya. 2003.
-*Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Percetakan dan Stensil Djumali, Surabaya, 1995.
- M. HadjonPhilipus dan Sri DjamiatiTatiek, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2005.
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa Gadai Dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2005.

- Pandu Yudha, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.
- Poltak Sinambela Lijan, et.al, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Cet. 1, Alumni, Bandung 1999.
- Santoso Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soerodjo Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
-*Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Subekti R. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Tobing G.HS. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990.
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad tahun 1847 nomor 23 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.(Lembaran Negara 1960-104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

C. SUMBER LAIN

Surahmin, *Relevansi Menghapus Kewenangan Notaris*, www.hukumonline.com

